
ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SEMANGAT DALAM KABUPATEN BARITO KUALA

Nike Purnamawati¹✉, Safa Musdalifah²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia
e-mail korespondensi: nike.purnawati@ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala menggunakan teori POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) menurut George R. Terry. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada 8 (delapan) informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam belum berjalan optimal pada seluruh dimensi POAC George R. Terry. 1) Planning (Perencanaan) belum tersedia peraturan desa, program khusus dan alokasi anggaran pengelolaan sampah. 2) Organizing (Pengorganisasian) belum terbentuk tim atau struktur khusus yang menangani pengelolaan sampah serta koordinasi masih bersifat informal. 3) Actuating (Perencanaan) pelaksanaan pengelolaan masih terbatas pada himbauan berupa spanduk dan fasilitas yang minim tanpa adanya inovasi berkelanjutan. 4) Controlling (Pengendalian) belum adanya pengawasan rutin, evaluasi berkala dan sanksi yang mengikat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa segera mengesahkan peraturan desa tentang sampah, membentuk tim pengelola sampah, mengalokasikan anggaran khusus dan membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan, serta diperlukan penguatan tata kelola berbasis kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak terkait agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi; Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; POAC; Tata Kelola Desa

Abstract

This study aims to analyze the Village Government's strategy in waste management in Semangat Dalam Village, Barito Kuala Regency using the POAC theory (Planning, Organizing, Actuating and Controlling) according to George R. Terry. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, documentation and in-depth interviews with 8 (eight) informants selected purposively. The results showed that the waste management strategy in Semangat Dalam Village has not run optimally on all dimensions of George R. Terry's POAC. 1) Planning has not available village regulations, special programs and budget allocation for waste management. 2) Organizing has not formed a special team or structure to handle waste management and coordination is still informal. 3) Actuating implementation of management is still limited to appeals in the form of banners and minimal facilities without sustainable innovation. 4) Controlling has not regular supervision, periodic evaluation and binding sanctions. This study recommends that the village government immediately pass village regulations on waste, form a waste management team, allocate a special budget and build a sustainable supervision system, and strengthen governance based on collaboration between the village government, community and related parties so that waste management can run more sustainably.

Keywords: POAC; Strategy; Village Governance; Village Government; Waste Management

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan perluasan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, khususnya desa-desa yang berbatasan langsung dengan area perkotaan membawa dampak signifikan terhadap lonjakan volume timbunan sampah domestik. Transformasi yang secara cepat dari lahan agraris menjadi kawasan hunian padat tidak jarang memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan kompleksitas jenis sampah yang dihasilkan (Damanhuri & Padmi, 2016). Fenomena ini menjadi tantangan sosiologis dan ekologis yang serius bagi institusi pemerintahan di tingkat lokal, mengingat keterbatasan infrastruktur dan kapasitas tata kelola lingkungan yang dimiliki oleh wilayah perdesaan sering kali belum siap menghadapi dinamika tersebut (Riswan dkk., 2019). Di tingkat *grass-roots*, Pemerintah Desa memiliki mandat konstitusional dan otonomi untuk mengurus tata lingkungan serta pelayanan publik secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurcholis, 2018). Namun, realitas empiris secara nyata di banyak wilayah menunjukkan bahwa urusan pengelolaan sampah sering kali dikesampingkan dari skala prioritas

perencanaan pembangunan desa, di mana alokasi dana desa (APBDes) cenderung lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan (Kusnadi, 2017). Lemahnya regulasi formal berupa peraturan desa (Perdes) mengenai persampahan menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada rendahnya kepatuhan warga dan maraknya titik pembuangan sampah liar di sepanjang jalan protokol desa (Siagian, 2018).

Salah satu wilayah perdesaan yang mengalami krisis persampahan struktural ini adalah Desa Semangat Dalam di Kabupaten Barito Kuala. Sebagai kawasan penyangga dengan pertumbuhan kompleks perumahan yang sangat masif, desa ini memproduksi ratusan kilo sampah rumah tangga setiap harinya tanpa didukung oleh sistem pengelolaan yang sistematis dari pemerintah desa setempat. Penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) oleh pemerintah akibat keluhan polusi lingkungan justru memicu masalah baru, di mana warga beralih membuang sampah ke sungai dan lahan kosong di malam hari guna menghindari pengawasan (Sasaki & Araki, 2016). Akibatnya, tata kelola sampah di desa ini berjalan secara tidak teratur, reaktif dan sangat bergantung pada inisiatif swadaya masyarakat yang tidak merata. Urgensi dari penelitian ini terletak pada mendesaknya kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam mengintervensi krisis lingkungan di tingkat lokal melalui fungsi-fungsi manajerial yang komprehensif. Kegagalan penanganan persampahan di tingkat desa tidak hanya merusak estetika ruang publik tetapi juga membawa implikasi serius terhadap degradasi kualitas kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan seperti pencemaran sumber air bersih dan risiko banjir akibat pendangkalan sungai. Oleh karena itu, pengkajian secara mendalam menggunakan pendekatan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) menurut George R. Terry menjadi krusial untuk mengurai secara sistematis hambatan struktural, finansial, dan manajerial yang dialami oleh aparat desa (Syahputra & Aslami, 2023).

Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi praktis dalam memberikan peta jalan (roadmap) bagi perumusan kebijakan tata kelola lingkungan berbasis kolaborasi di tingkat perdesaan. Di tengah dinamika pemotongan fiskal dan restrukturisasi dana desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu merancang strategi inovatif, efisien dan partisipatif tanpa harus membebani keuangan daerah (Permatasari dkk., 2025). Melalui hasil analisis fungsi-fungsi manajemen ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan kelembagaan lokal, pengesahan regulasi yang mengikat serta optimalisasi partisipasi warga dalam pengurangan sampah dari sumbernya (Arifin dkk., 2024). Meskipun studi mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat maupun pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, sebagian besar literatur masih berfokus pada lokus perkotaan (*urban centers*)

dengan karakteristik kapasitas fiskal dan infrastruktur kedinasan yang mapan (Suryani, 2018; Artiningsih dkk., 2019). Terdapat keterbatasan literatur atau *research gap* yang secara spesifik meneliti bagaimana fungsi-fungsi manajerial dijalankan oleh pemerintah desa di wilayah peri-urban yang mengalami transisi demografis yang cepat, di mana dinamika sosiologis masyarakat kompleks perumahan berbenturan dengan kapasitas birokrasi desa yang masih tradisional (Amaliatulwalidain, 2022). Studi terdahulu sering kali memandang masalah sampah semata-mata sebagai problem teknis operasional, bukan sebagai kegagalan fungsi manajemen pemerintahan desa yang terstruktur dari perencanaan hingga pengendalian.

Untuk memperjelas posisi (*positioning*) penelitian ini di antara studi-studi sejenis yang telah ada, Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan sistematis antara penelitian ini dengan enam penelitian relevan terdahulu, mencakup fokus penelitian, temuan utama, kelemahan penelitian, serta posisi penelitian saat ini.

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu (*State of the Art*)

Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan Penelitian	Posisi Penelitian Saat Ini
Arifin dkk. (2024)	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Kenep, Kabupaten Bojonegoro	Partisipasi masyarakat berperan penting namun masih terhambat oleh keterbatasan sarana dan kesadaran warga	Partisipasi masyarakat dilihat terlepas dari kinerja manajerial pemerintah desa; tidak menggunakan kerangka fungsi manajemen yang utuh	Penelitian ini memosisikan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari fungsi <i>Organizing</i> dan <i>Actuating</i> pemerintah desa bukan variabel yang berdiri sendiri
Artiningsih dkk. (2019)	Partisipasi masyarakat komunitas perumahan peri-urban dalam reduksi sampah organik domestik	Partisipasi warga secara langsung dapat menurunkan volume sampah organik rumah tangga	Berfokus pada perilaku rumah tangga semata, tanpa mengkaji peran dan kapasitas manajerial pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi tersebut	Menempatkan pemerintah desa sebagai aktor sentral yang kinerja manajerialnya dianalisis melalui POAC, melengkapi perspektif partisipasi warga
Suryani (2018)	Efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di sektor publik daerah peri-urban	Efektivitas kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal pemerintah daerah	Unit analisis berada di level kabupaten/kota, belum menyentuh pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terkecil dengan karakteristik kelembagaan berbeda	Menurunkan level analisis ke pemerintah desa, unit pemerintahan dengan sumber daya dan kewenangan paling terbatas
Permatasari dkk. (2025)	Penerapan teori POAC George R. Terry pada manajemen media online dinas komunikasi dan informatika	Keempat fungsi POAC saling memengaruhi keberhasilan keterbukaan informasi publik	Diterapkan pada isu komunikasi publik di tingkat dinas kabupaten, bukan pada isu lingkungan/persampahan di tingkat pemerintahan desa	Mentransfer aplikasi teori POAC ke konteks pengelolaan sampah desa yang memiliki dinamika sosial, fiskal dan kelembagaan yang berbeda

Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan Penelitian	Posisi Penelitian Saat Ini
Riswan dkk. (2019)	Dampak alih fungsi lahan peri-urban terhadap volume timbunan sampah domestik lokal	Konversi lahan permukiman meningkatkan volume dan kompleksitas timbunan sampah	Bersifat deskriptif-kuantitatif pada aspek volume sampah, tidak mengkaji respons kelembagaan pemerintah terhadap tekanan tersebut	Menjawab dimensi kelembagaan yang belum disentuh, yaitu bagaimana pemerintah desa merespons tekanan volume sampah akibat alih fungsi lahan
Amaliatulwalidain (2022)	Pemerintahan desa dan demokratisasi pasca Orde Baru	Otonomi desa membuka ruang partisipasi, namun kapasitas birokrasi desa masih lemah	Bersifat makro-konseptual mengenai demokratisasi desa, tidak menyoroti sektor teknis tertentu seperti pengelolaan sampah	Mengoperasionalkan isu kapasitas birokrasi desa tersebut secara spesifik pada sektor pengelolaan sampah melalui kerangka POAC

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2026

Secara kolektif, keenam penelitian pada Tabel 1 memperlihatkan tiga kelemahan mendasar yang menjadi dasar kebutuhan penelitian ini. Pertama, kelemahan unit analisis: penelitian seperti Arifin dkk. (2024) dan Artiningsih dkk. (2019) menempatkan masyarakat sebagai unit analisis utama sehingga kinerja manajerial pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik luput dari sorotan. Kedua, kelemahan level pemerintahan: penelitian Suryani (2018) dan Amaliatulwalidain (2022) beroperasi pada level kabupaten/kota atau bersifat makro-konseptual, sehingga karakteristik kelembagaan pemerintah desa yang jauh lebih terbatas dari segi kewenangan, anggaran dan sumber daya manusia tidak tergambarkan secara spesifik. Ketiga, kelemahan cakupan fungsi manajemen: penelitian Permatasari dkk. (2025) telah menerapkan kerangka POAC namun pada objek yang sama sekali berbeda (komunikasi publik), sementara Riswan dkk. (2019) hanya menyoroti aspek volume timbunan sampah tanpa mengkaji respons kelembagaan pemerintah desa terhadapnya. Ketiadaan penelitian yang secara eksplisit memakai keempat dimensi POAC untuk membedah kinerja pemerintah desa dalam isu persampahan di kawasan perbatasan antara perdesaan dan perkotaan (peri-urban) inilah yang menjadi celah (gap) yang diisi oleh penelitian ini. Studi paling mutakhir yang sebanding, yaitu penelitian Nuranindita dan Choiriyah (2026) di Desa Ngaban Kabupaten Sidoarjo, telah menerapkan kerangka POAC pada pengelolaan sampah desa, namun berfokus pada aspek retribusi dan kinerja unit TPS3R semata tanpa mengurai keterkaitan antardimensi POAC secara konseptual sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini, sehingga posisi penelitian ini tetap relevan dan orisinal.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada integrasi teori manajemen POAC George R. Terry untuk mengevaluasi kinerja birokrasi pemerintahan desa dalam mengatasi dilema persampahan pedesaan dengan pendekatan kualitatif-empiris. Sementara penelitian lain cenderung melihat

partisipasi masyarakat secara terpisah (Arifin dkk., 2024), penelitian ini memosisikan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem manajerial publik yang saling memengaruhi. Perbedaan mendasar dengan studi Artiningsih dkk. (2019) dan Suryani (2018) terletak pada unit analisis: kedua studi tersebut menyoroti perilaku warga atau efektivitas kebijakan pada level kabupaten/kota, sedangkan penelitian ini menjadikan pemerintah desa sebagai unit analisis utama yang dibedah melalui empat fungsi manajemen secara simultan, bukan hanya salah satu fungsi seperti pada studi Permatasari dkk. (2025) yang menerapkan POAC pada isu komunikasi publik. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperluas aplikasi teori POAC George R. Terry ke ranah tata kelola lingkungan di tingkat pemerintahan desa transisi perdesaan dan perkotaan, konteks yang belum banyak disentuh oleh literatur manajemen publik maupun studi persampahan sebelumnya. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi dengan merumuskan peta hambatan manajerial yang spesifik dan dapat menjadi rujukan langsung bagi pemerintah desa lain dengan karakteristik sistem perdesaan dan perkotaan serupa dalam menyusun kebijakan persampahan berbasis penguatan fungsi manajemen bukan sekadar imbauan normatif. Dengan demikian, pengisian celah empiris ini tidak hanya memperkaya khazanah studi ilmu pemerintahan mengenai otonomi desa tetapi juga memberikan perspektif baru tentang batas kemampuan administratif desa dalam mengelola ekosistem lingkungan yang mengalami urbanisasi pesat. Pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh negara (Nurcholis, 2018). Pemerintahan desa memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan yang berkelanjutan (Kusnadi, 2017). Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa merupakan keterlibatan warga dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi pembangunan desa. Partisipasi menjadi elemen penting karena keberhasilan tata kelola desa sangat bergantung pada hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat (Amaliatulwalidain, 2022).

Teori POAC merupakan kerangka manajemen yang dikembangkan oleh George R. Terry yang membagi fungsi manajemen ke dalam empat tahapan utama: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan) dan *Controlling* (Pengendalian). *Planning* (Perencanaan) merupakan fungsi dasar manajemen yang menentukan tujuan organisasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan mencakup penetapan sasaran, penyusunan program kerja, pengalokasian sumber daya serta penentuan strategi yang akan digunakan. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat dan menggunakan asumsi mengenai masa depan dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan (Wijayanti & Wicaksana, 2023). *Organizing* (Pengorganisasian) adalah proses pembagian tugas sesuai struktur organisasi, mengalokasikan sarana produksi dan memimpin rencana kerja. Hal ini mencakup pembentukan bagian, pembagian tugas dan pengelompokan kerja untuk memastikan struktur selaras dengan tujuan, sumber daya dan lingkungan operasional (Permatasari dkk., 2025). *Actuating* (Penggerakan) pada dasarnya merupakan tindakan seorang pemimpin yang membimbing serta mengarahkan dan menggerakkan seluruh bagian pada struktur organisasi dalam pelaksanaan proses manajemen sehingga tercapainya sebuah tujuan dan mendapatkan keberhasilan (Syahputra & Aslami, 2023). *Controlling* (Pengendalian) sangat berperan penting dalam melihat apakah proses manajemen berjalan dengan baik mencapai tujuan sasaran ataupun sebaliknya. Maka dengan itu langkah yang harus diambil dalam *Controlling* adalah mengamati, menilai, mengevaluasi dan mengoreksi setiap langkah perencanaan berjalan sesuai dengan rencana atau sebaliknya (Syahputra & Aslami, 2023).

Menurut Azwar (2016), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, tidak dapat dipakai lagi, tidak disenangi dan harus dibuang. Maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi (Suryani, 2018). Secara sederhana jenis sampah dibagi berdasarkan sifat, yakni organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur, sampah ini mudah terurai sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak terurai, seperti karet, plastik, kaleng dan logam (Hartono, 2018). Menurut Sejati (2024), pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (Suryani, 2018). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah. Keterlibatan tersebut menjadi unsur penting karena masyarakat merupakan penghasil utama timbulan sampah sekaligus aktor utama dalam pengurangan sampah dari sumbernya (Arifin dkk., 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang, tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu pada Tabel 1, serta *research gap* yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana strategi Pemerintah

Desa Semangat Dalam dalam pengelolaan sampah ditinjau dari dimensi *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling* menurut George R. Terry; dan 2) mengapa fungsi-fungsi manajemen tersebut belum mampu diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah desa. Kedua rumusan masalah tersebut secara langsung dijawab melalui tujuan penelitian ini, yaitu: 1) menganalisis strategi pengelolaan sampah pemerintah desa berdasarkan keempat dimensi POAC; dan 2) mengidentifikasi serta menguraikan secara konseptual faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi fungsi manajemen tersebut. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini secara langsung mengisi *research gap* yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu minimnya kajian yang menempatkan pemerintah desa di kawasan pebatasan antara perdesaan dan perkotaan sebagai unit analisis utama dalam kerangka fungsi manajerial yang utuh, dan bukan sekadar sebagai objek partisipasi masyarakat semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan strategi pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Sahir, 2021). Penelitian ini berlokasi di Desa Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala. Lokasi ini dipilih karena Desa Semangat Dalam merupakan salah satu desa dengan tingkat pertumbuhan permukiman yang tinggi di Barito Kuala tetapi belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 8 (delapan) informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, yaitu: 1) Kepala Desa Semangat Dalam, 2) Sekretaris Desa, 3) Kasi Kesejahteraan, 4) Kaur Perencanaan, 5) Kaur Keuangan, 6) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 7) Ketua RT 04, dan 8) Perwakilan masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan aktor-aktor kunci yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sampah di tingkat desa. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori POAC menurut George R. Terry sebagai pisau analisis utama untuk memetakan strategi pengelolaan sampah pemerintah desa.

Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini

menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antar informan dari unsur pemerintah desa, BPD, ketua RT dan masyarakat, serta triangulasi teknik dengan mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi lapangan dan dokumentasi terkait kondisi persampahan di Desa Semangat Dalam. Langkah ini sejalan dengan penelitian sejenis pada pemerintahan desa lain, seperti Nuranindita dan Choiriyah (2026), yang juga menggunakan model analisis interaktif dan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan dalam mengevaluasi fungsi manajemen POAC di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan 8 (delapan) informan kunci, berikut ini adalah hasil dan pembahasan tentang analisis strategi pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala berdasarkan 4 (empat) dimensi teori POAC menurut George R. Terry:

1. *Planning* (Perencanaan)

Dimensi *Planning* (Perencanaan) tentang strategi pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam belum terlaksana secara optimal dan belum menjadi prioritas pembangunan desa yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah dan Jenis Sampah

Seluruh informan sepakat bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan oleh masyarakat dan tidak terkelola dengan baik. Kepala Desa Semangat Dalam menyatakan:

"Sampah rumah tangga. Contohnya sisa makanan, plastik dan bungkus-bungkus makanan atau sejenisnya yang menggunakan kemasan dan plastik."

Pendapat serupa juga dikatakan Sekretaris Desa yang mengatakan adanya tempat pembuangan sampah liar di sekitar jalan semangat raya. Kaur Keuangan bahkan menggambarkan kondisi yang lebih parah dengan menyatakan bahwa sampah rumah tangga tidak hanya dibuang sembarangan di pinggir jalan tetapi sebagian warga masih membuang sampah ke sungai. Ketua RT 04 juga menambahkan tentang asal mula permasalahan sampah di Desa Semangat Dalam, yang mengatakan:

"Kalau dulu sebelum banyaknya perumahan permasalahan sampah ini masih aman saja. Tetapi memang banyak warga yang membuang sampah di sungai. Tapi dengan semakin tahun semakin banyak perumahan dan alih fungsi lahan yang menjadi lahan pemukiman di Desa Semangat Dalam maka permasalahan sampah rumah tangga menjadi permasalahan utamanya sedangkan sebelumnya karena hanya sedikit perumahan maka tidak muncul masalah sampah."

Salah satu masyarakat mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah di jalan raya sehingga menjadi tumpukan sampah dan sampah yang dibuang merupakan sampah hasil rumah tangga karena merupakan lahan permukiman. Permasalahan sampah di Desa Semangat Dalam sesuai dengan temuan Damanhuri dan Padmi (2010) yang menyatakan bahwa pertumbuhan permukiman yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah akan menciptakan krisis persampahan yang semakin parah dari waktu ke waktu. Permasalahan serupa menurut Riswan et al. (2011) menunjukkan bahwa daerah pinggiran kota yang mengalami konversi lahan menjadi kawasan permukiman cenderung menghadapi masalah persampahan yang lebih kompleks dibandingkan kawasan perkotaan yang sudah mapan.

b. Program dan Peraturan Desa

Salah satu yang penting perencanaan adalah adanya program dan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Semangat Dalam sebenarnya telah memiliki inisiatif untuk membuat peraturan desa tentang sampah tetapi dapat kendala dalam mensahkan. Kepala Desa mengungkapkan:

"Ada peraturan desanya tentang sampah. Tapi masih belum disahkan. Tahapnya baru sampai pembuatan saja. Musyawarah desa sudah dilakukan dengan menghadirkan Ketua RT dan Ketua BPD. Tapi sampai pembuatan. Tidak berjalan lebih lanjut karena tidak ada lanjutan dari tingkat atasnya."

Ketua BPD juga mengatakan hal yang sama, bahwa rancangan peraturan desa tentang sampah masih dalam bentuk rancangan dan belum disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sementara Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, Kaur Perencanaan, Ketua RT 04 dan masyarakat mengatakan hingga saat ini tidak ada program khusus terkait pengelolaan sampah yang dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan baru sampai pada inisiasi dan belum menghasilkan produk hukum sebagai landasan implementasi program secara nyata.

Tidak adanya peraturan dan program pengelolaan sampah ini bertentangan dengan prinsip perencanaan oleh Siagian (2014) yang menekankan bahwa perencanaan yang baik harus menghasilkan program kerja yang jelas, terukur dan dapat diimplementasikan.

c. Anggaran Pengelolaan Sampah

Anggaran merupakan komponen kritis dalam menjamin keberlanjutan program. Secara konsisten, seluruh informan dari jajaran pemerintah desa menyatakan tidak ada anggaran khusus untuk pengelolaan sampah. Kepala Desa menjelaskan:

"Tidak ada anggaran untuk program pengelolaan sampah, menggunakan dana desa juga tidak ada karena setiap tahun anggaran desa semakin dikurangi, jadi kami kekurangan dana untuk hal tersebut. Tetapi beberapa kali saya atasi dengan menggunakan uang pribadi. Contohnya kasus sampah di depan komplek Persada Raya 2 dan di depan komplek Lyandra. Saya menggunakan uang pribadi untuk memberi orang khusus untuk menjaga tempat pembuangan sampah illegal disana."

Ketiadaan alokasi anggaran dalam APBDes ini mengakibatkan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah bergantung sepenuhnya pada bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala. Fakta bahwa Kepala Desa sampai harus menggunakan uang pribadi untuk mengatasi permasalahan sampah menunjukkan betapa kritis kondisi keuangan desa dalam pengelolaan sampah. Kaur Keuangan menyatakan bahwa tidak ada perencanaan anggaran terkait pengelolaan sampah. Sedangkan masyarakat mengatakan bahwa mereka harus mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 25.000 per bulan untuk membayar jasa pengangkut sampah swasta.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Sasaki dan Araki (2014) yang mengidentifikasi keterbatasan fiskal sebagai salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah di daerah pedesaan berkembang. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebenarnya membuka ruang bagi pengalokasian dana desa untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, namun hal ini tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Desa Semangat Dalam.

d. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah, Kepala Desa menyebut bahwa musyawarah desa (Musdes) telah digunakan sebagai forum perencanaan yang dihadiri pemerintah desa, BPD, ketua RT dan tokoh masyarakat. Ketua BPD juga mengatakan bahwa biasanya waktu musyawarah desa (musdes) kami membahas masalah sampah dan upaya penyelesaiannya. Tapi perangkat desa lainnya dan Ketua RT 04 mengatakan hal berbeda bahwa belum ada musyawarah khusus tentang perencanaan pengelolaan sampah. Satu-satunya forum yang membahas sampah adalah musyawarah musyawarah desa. Permasalahan sampah kadang disinggung tapi tidak menjadi agenda utama yang menghasilkan keputusan konkret. Sedangkan masyarakat mengakui tidak pernah terlibat dalam rapat atau musyawarah desa secara langsung terutama tentang sampah.

Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah masih terbatas. Artiningsih et al. (2012) menekankan perencanaan pengelolaan sampah yang partisipatif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan persampahan di tingkat lokal. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan, program-program yang dihasilkan cenderung tidak tepat sasaran dan kurang mendapat dukungan dari komunitas.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pada dimensi *Organizing* (Pengorganisasian) strategi pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam dapat disimpulkan belum berjalan dengan optimal karena belum adanya organisasi atau unit khususnya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Struktur dan Tim Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan mengatakan hal yang serupa bahwa tidak ada struktur atau tim khususnya. Kepala Desa mengatakan bahwa:

"Tidak ada karena kalau membuat tim khusus memerlukan Surat Keputusan (SK). Sedangkan membuat SK tersebut adauntutannya yakni pemerintah desa wajib memberikan gaji dari keluarnya SK dan dananya kami juga tidak ada. Sedangkan apabila ada SK tapi tidak ada diberikan gaji kepada nama yang ada di SK tersebut apabila ada pengusutan maka kami akan kena kasusnya."

Pernyataan ini mengungkap hambatan birokrasi dan fiskal yang saling berkaitan dalam pembentukan tim pengelola sampah. Tanpa SK resmi, tidak ada legitimasi hukum bagi tim pengelola untuk beroperasi. Tetapi penerbitan SK mensyaratkan tersedianya anggaran honorarium yang tidak dimiliki oleh desa. Kondisi ini tentunya membuat dilema di pemerintah desa karena di satu sisi dibutuhkan tim khusus untuk mengelola sampah tetapi di sisi lain tidak ada anggaran untuk membiayai operasionalnya. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pengorganisasian dalam manajemen publik yang menekankan pentingnya kejelasan struktur dan tanggung jawab dalam setiap aspek pelayanan publik (Drucker, 2008).

b. Koordinasi dalam Pengelolaan Sampah

Meskipun tidak ada tim khusus, pemerintah desa tetap menjalankan beberapa mekanisme koordinasi yang bersifat informal. Dari hasil wawancara, ditemukan beberapa pola koordinasi yang berlaku. Pertama, koordinasi vertikal melalui himbauan Kepala Desa kepada Ketua RT untuk menyampaikan pesan kepada warganya. Kepala Desa menyatakan:

"Bentuk koordinasinya berupa himbauan. Himbauan yang diberikan kepada ketua RT agar menyampaikan lebih lanjut kepada"

masyarakatnya agar tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan kepada masyarakat secara langsung biasanya kami membuat spanduk seperti larangan untuk membuang sampah di tempat-tempat tertentu."

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ketua RT 04 yang mengatakan bahwa:

"Koordinasinya biasanya kalau ada musyawarah perencanaan pembangunan, disana saya sarankan bahwa sebaiknya setiap rumah diberikan atau ada memiliki bak sampah tapi karena keterbatasan dana jadi hal tersebut tidak bisa diwujudkan."

Kedua, koordinasi horizontal melalui sosialisasi kepada masyarakat. Ketua BPD menyebutkan bahwa sering diadakan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dengan melibatkan ketua RT. Namun, sosialisasi ini tidak terjadwal secara rutin. Ketiga, koordinasi eksternal dengan instansi terkait. Ketua BPD menyebutkan bahwa pernah membuat proposal kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta bantuan berupa alat dan sarana tempat sampah.

Tetapi Kasi Kesejahteraan dan Kaur Perencanaan secara tegas menyatakan bahwa sejauh ini belum ada koordinasi khusus antara pemerintah desa, ketua BPD, ketua RT/RW dan masyarakat dalam urusan pengelolaan sampah. Ketiadaan koordinasi yang terstruktur dan formal ini bertentangan dengan prinsip pengorganisasian yang efektif. Menurut Robbins dan Coulter (2012) koordinasi yang efektif memerlukan saluran komunikasi yang jelas, mekanisme rapat yang terjadwal dan sistem pelaporan yang baku. Tanpa elemen-elemen tersebut, upaya pengelolaan sampah akan selalu bersifat reaktif dan tidak sistematis. Temuan ini konsisten dengan penelitian terbaru Mufidah dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat pemerintahan lokal tanpa standar operasional prosedur dan mekanisme komunikasi yang jelas akan menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta Lupiyanto dkk. (2023) yang menegaskan bahwa kinerja pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kelembagaan pengelola dan koordinasi organisasi.

c. Peran Relawan Sampah

Tidak adanya tim khusus mengakibatkan munculnya komunitas khusus sebagai pengganti. Kasi Kesejahteraan menyebutkan adanya kelompok masyarakat atau relawan penjaga sampah yang membantu pengelolaan sampah. Ketua RT 04 juga mengatakan tentang keberadaan relawan pengambil sampah:

"Relawannya yaitu orang khusus pengambil sampah. Biasanya sampah di tempat kami diambil sehari sekali disetiap rumah. Dananya dari dana sukarela masyarakat yang sampahnya diambil relawan dirumah yang memberi dana. Tapi permasalahannya,

apabila ada sampah yang memiliki nilai jual bagi pemulung, seperti kardus dan botol minum atau jenis sampah tertentu lainnya apabila diletakkan di depan rumah dan dilihat pemulung sebelum diambil relawan sampah bisa di obrak-abrik oleh pemulung sehingga menimbulkan sampah berserakan lagi.

Hal ini senada dengan pernyataan masyarakat yang mengatakan adanya petugas pengangkut sampah yang mengambil sampah dari rumah ke rumah dengan imbalan Rp 25.000 per bulan secara sukarela. tetapi kenyataannya sistem ini hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat dan tidak mencakup mereka yang tidak mampu membayar. Sedangkan Sekretaris Desa mengatakan yang ada hanyalah pemulung yang bekerja untuk kepentingan ekonomi pribadi bukan relawan terorganisir.

Kondisi pengorganisasian ini belum memenuhi prinsip dasar *Organizing* menurut Terry yang menekankan pentingnya departementasi, spesialisasi kerja dan rantai komando yang jelas. Lemahnya pengorganisasian menjadi salah satu faktor utama tidak berjalannya pengelolaan sampah secara sistematis.

d. Kendala Pengorganisasian dalam Pengelolaan Sampah

Pada pelaksanaan tentunya terdapat kendala dalam pengorganisasian. Hal ini sesuai dengan pendapat sekretaris desa yang mengatakan:

“Sulit untuk pengorganisasian pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam. Hal ini dari segi pendanaan petugas yang menjaga atau memastikan sampah tidak dibuang sembarangan. Meskipun warga sudah dihimbau namun sampah yang menumpuk juga merupakan sampah kiriman dari wilayah tetangga.”

Hal serupa juga disampaikan Kasi Kesejahteraan, mengatakan tidak adanya pembuangan sampah khusus yang dikelola oleh petugas dengan baik. Sedangkan Ketua BPD mengatakan bahwa belum ada masyarakat yang bersedia menjadi relawan sampah. Hal berbeda disampaikan oleh Ketua RT 04 yang mengatakan tidak ada kendala karena tidak adanya tim khusus dalam pengelolaan sampah tersebut.

3. *Actuating* (Penggerakan)

Pada dimensi *Actuating* (Penggerakan) strategi pengelolaan sampah di Desa Semangat, didominasi oleh pendekatan persuasif dan belum berkembang menjadi program nyata. Pemerintah desa belum memiliki program prioritas pengelolaan sampah karena belum adanya regulasi dan dukungan pendanaan, diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sampah yang Dijalankan

Hasil menunjukkan pemerintah desa belum memiliki program pengelolaan sampah yang terstruktur dan berkelanjutan. Kepala Desa

menegaskan programnya tidak ada karena peraturannya belum disahkan. Sekretaris Desa mengatakan:

"Belum ada program yang dijalankan yang menjadi prioritas desa. Pemerintah desa hanya berkoordinasi dengan RT agar warganya tidak buang sampah sembarangan. Salah satunya menutup TPS di depan Persada Raya II dan Persada Raya III."

Tetapi dengan adanya penutupan TPS tersebut justru menimbulkan masalah baru. karena akhirnya masyarakat membuang sampah rumah tangganya kelokasi lain. Padahal lokasi tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Sedangkan informan lainnya, baik dari pemerintah desa yang lain, Ketua BPD, Ketua RT 04 dan masyarakat sepakat mengatakan bahwa tidak ada program pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam. Tidak adanya program yang terstruktur ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang mewajibkan pemerintah daerah/desa untuk menyediakan dan mengelola sarana pengumpulan sampah serta melakukan pembinaan kepada masyarakat.

b. Fasilitas dalam Pengelolaan Sampah

Hasil menunjukkan fasilitas yang ada sangat terbatas dan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup bukan inisiatif mandiri pemerintah desa. Kepala Desa menjelaskan:

"Dulu ada hibah gerobak sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala untuk 53 RT di Desa Semangat Dalam, untuk yang baru ini ada hibah 2 bak sampah yang berwarna hijau di depan komplek Lyandra dari Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala juga. Baru awal tahun 2026 tadi karena ada lomba Adipura jadi Desa Semangat Dalam dapat 2 bak sampah."

Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat yang mengatakan:

"Fasilitasnya saya tidak tahu dengan pastinya, yang saya lihat di depan komplek Lyandra itu ada 2 bak sampah warna hijau. Baru tahun ini saja saya melihatnya. Tapi kecil juga bak nya jadi masyarakat masih banyak yang membuang diluarnya. Masih banyak sampah yang tertimbun diluar dan sepanjang jalan."

Sedangkan Sekretaris Desa mengatakan bahwa pernah ada TPS, yaitu:

"Dulu ada TPS di depan Persada Raya II dan Persada Raya III. Namun sudah ditutup karena menimbulkan dampak lingkungan yang besar dan tidak terkendali dengan TPS yang kecil. Namun yang membuang sampah ke TPS tersebut tidak hanya warga Desa Semangat Dalam saja tapi ada dari beberapa desa."

Penutupan terjadi karena berdampingan dengan tanah kosong milik warga, dengan volume sampah yang besar sehingga berdampak tumpukan

sampah ke tanah kosong yang dimiliki warga. Kaur Keuangan menyebutkan bahwa untuk sarana dan prasarana sampah, sebagian warga kompleks mengelolanya secara mandiri dengan sistem iuran bulanan.

Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan sarana persampahan yang ada dengan kapasitas penyediaannya. Kondisi sarana prasarana yang sangat minim ini diperparah oleh factor lainnya. Pertama, kapasitas bak sampah yang sangat terbatas sehingga tidak mampu menampung volume sampah yang ada. Kedua, ketiadaan Tempat Pembuangan Sementara resmi dan dikelola secara profesional. Ketiga, kondisi kendaraan pengangkut sampah yang telah rusak akibat tidak adanya perawatan. Walaupun Kasi Kesejahteraan menyatakan bahwa gerobak pengangkut sampah yang diberikan kondisinya masih baik tapi kurang terawat dikarenakan tidak adanya petugas pengelola sampah khusus.

c. Inovasi Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian dengan semua informan disimpulkan bahwa belum ada inovasi dalam pengelolaan sampah. Kepala Desa mengatakan:

"Untuk inovasi tidak ada. Bank sampah sudah ada tanahnya dari hibah pemborong perumahan. Di dalam komplek Lyandra di ujung sana letaknya. Sudah diurukan juga halamannya. Cuma belum ditindaklanjuti, Karena tidak ada dananya juga untuk membangunnya."

Ketua BPD menambahkan bahwa desa pernah menawarkan program bank sampah namun tidak mendapat respons yang positif dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan realisasi inovasi tidak hanya datang dari keterbatasan dana pemerintah desa tetapi juga dari rendahnya partisipasi aktif masyarakat.

Hal berbeda di sampaikan Ketua RT 04 yang mengatakan bahwa:

"Kalau di RT kami biasanya programnya hanya pemotongan rumput setiap bulannya. Karena di sekitar sungai sini banyak tumbuh rumput liar sehingga setiap bulan harus selalu di potong rumputnya."

Tidak adanya inovasi ini menjadi tantangan serius, padahal program bank sampah terbukti efektif mengurangi volume sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Subekti, 2010 mengatakan bank sampah dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA hingga 20-30% sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Studi terbaru Rahmayanti dkk. (2022) pada pengelolaan bank sampah di Kabupaten Sidoarjo turut membuktikan bahwa program tersebut mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sementara Anggraini dkk. (2024) menunjukkan bahwa strategi sosialisasi dan edukasi langsung kepada

masyarakat efektif meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah berbasis desa.

d. Upaya Sosialisasi dan Edukasi

Satu-satunya bentuk penggerakan yang dilakukan Pemerintah Desa adalah sosialisasi melalui spanduk. Hal ini sesuai dengan pendapat semua pemerintah desa. Kepala Desa menyebutkan adanya pemasangan spanduk larangan membuang sampah di tempat-tempat tertentu. Kasi Kesejahteraan menyebutkan upaya yang dilakukan pihak desa adalah memberikan himbauan melalui spanduk agar masyarakat yang membuang sampah sembarangan memiliki kesadaran tentang dampak buruknya.

Namun, efektivitas spanduk sebagai media sosialisasi patut dipertanyakan. Karena masyarakat mengatakan spanduk yang pernah dipasang kini sudah tidak ada lagi. Kepala Desa sendiri mengakui ketidakpastian keberadaan spanduk-spanduk tersebut. Sedangkan Kaur Keuangan menilai bahwa sosialisasi yang ada belum efektif karena belum diimbangi dengan penyediaan TPS yang memadai.

Hal berbeda disampaikan oleh Ketua RT 04, mengatakan upaya yang dilakukan biasanya pada saat kegiatan RT seperti pembersihan lingkungan dengan memberitahu kepada masyarakat secara langsung agar tidak membuang sampah sembarangan. Keterbatasan sosialisasi ini bertentangan dengan prinsip manajemen perubahan perilaku yang menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah memerlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan dan multi-media bukan hanya melalui spanduk yang bersifat statis (Bandura, 2004).

4. *Controlling* (Pengendalian)

Dimensi *Controlling* (Pengendalian) dalam strategi pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam belum berjalan optimal karena pengawasan terhadap perilaku masyarakat dan kondisi lapangan belum dilakukan secara rutin dan belum memiliki mekanisme khusus:

a. Mekanisme Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada mekanisme pengawasan yang terstruktur dan sistematis. Kaur Perencanaan mengatakan bahwa tidak ada pengawasan oleh pemerintah desa. Kasi Kesejahteraan mengatakan saat ini pemerintah desa belum melakukan pengawasan secara khusus terhadap pengelolaan sampah. Ketua RT 04 bahkan menyatakan bahwa tidak ada pengawasan sama sekali.

Sedangkan Kepala Desa mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan melalui koordinasi dengan ketua RT dan Dinas Lingkungan Hidup melalui forum rapat atau musyawarah desa yang tidak terjadwal secara pasti. Ketua BPD mengatakan BPD bersama pemerintah desa selalu

mengawasi pengelolaan sampah namun pengawasan tersebut bersifat responsif dan tidak proaktif.

Sekretaris Desa mengidentifikasi hambatan utama pengawasan yaitu bahwa lokasi pembuangan sampah yang ada di samping jalan raya dan agak jauh dari pemukiman mempersulit pengawasan, ditambah tidak adanya petugas khusus untuk mengawasinya. Kepala Desa menawarkan solusi inovatif meski belum terealisasi:

"Harusnya ada yang jaga dari satpol pp berjaga di depan yang bukan pembuangan sampah tersebut dan apabila ada yang membuang sampah sebaiknya di foto orangnya dan fotonya di buat di spanduk yang di pasang di sekitar tempat pembuangan sampah illegal itu. Agar warga lain melihat dan orang yang membuang sampah sembarangan itu menjadi malu."

Ketiadaan pengawasan ini bertentangan dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Juwandi dan Taufan (2023) yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah sebagai pelayanan publik memerlukan penerapan prinsip *good governance*, termasuk transparansi dan partisipasi masyarakat, serta Wati dkk. (2021) yang menemukan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Indonesia masih dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan dan rendahnya partisipasi masyarakat.

b. Evaluasi Rutin

Seluruh informan sepakat mengatakan tidak pernah dilaksanakan evaluasi rutin dan terstruktur terhadap pengelolaan sampah. Kepala Desa mengakui evaluasi rutin tidak ada karena tidak ada peraturannya, yang mengatakan:

"Evaluasi rutin tidak ada. Karena tidak ada peraturan desanya. Tapi pernah ada kasus sampah di komplek Griya Permata, permasalahannya karena lahan tempat pembuangan sampah masyarakat yang merupakan tanah hibah bersampingan dengan tanah kosong milik pribadi. Jadi sampahnya ke tanah milik orang. Permasalahannya disaat orang tersebut ingin menjual tanahnya menjadi sulit. Karena tanahnya dipenuhi dengan sampah. Selanjutnya orang tersebut melaporkan ke pihak kami pemerintah desa. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami bersama ketua RT dan BPD melaporkan hal tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup. Tapi tidak ada juga solusinya. Lalu kami bakar sampah yang ada disana dan kami tutup permanen."

Ketua BPD merupakan satu-satunya informan yang menyebutkan adanya evaluasi tapi sifatnya tidak rutin dan dilakukan ketika ada musyawarah desa. Sedangkan masyarakat, sama sekali tidak mengetahui adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah desa. Ketiadaan evaluasi rutin

ini merupakan kelemahan dalam sistem manajemen pengelolaan sampah desa. Evaluasi yang tidak dilakukan secara berkala akan menyebabkan masalah-masalah yang ada tidak terdeteksi secara dini dan tindakan korektif tidak dapat diambil secara tepat waktu.

c. Kendala Struktural dalam Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala struktural yang menghambat efektivitas pengendalian pengelolaan sampah. Pertama, tidak adanya peraturan desa yang sah sebagai landasan hukum. Kedua, tidak ada petugas khusus yang bertugas melakukan pengawasan dilapangan. Ketiga, keterbatasan dana untuk membiayai kegiatan pengawasan dan penegakan. Keempat, faktor geografis yaitu lokasi pembuangan sampah yang tersebar di berbagai titik dan jauh dari pusat pemukiman yang menyulitkan pemantauan. Kepala Desa mengatakan bahwa:

"Kendalanya pembuangan sampah di atas jam 19.30 Wita. Banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di jam tersebut."

Fenomena membuang sampah di malam hari adalah strategi untuk menghindari dari pengawasan. Menunjukkan, masyarakat sesungguhnya menyadari larangan membuang sampah sembarangan tetapi tidak memiliki pilihan alternatif lainnya.

Kendala struktural ini sejalan dengan analisis Robbins dan Coulter (2012) yang mengatakan bahwa kegagalan sistem pengendalian dalam organisasi publik seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor kapasitas sumber daya, kejelasan regulasi dan motivasi pelaksana. Dalam konteks Desa Semangat Dalam, ketiga faktor tersebut sama-sama lemah sehingga menciptakan kondisi yang sangat tidak kondusif bagi efektivitas pengendalian.

d. Sanksi dan Kepatuhan Masyarakat

Penegakan peraturan dan sanksi merupakan komponen penting. Di Desa Semangat Dalam kepatuhan masyarakat sangat lemah dan tidak ada sanksi yang diberikan, sesuai dengan pernyataan semua informan. Kepala Desa menyatakan:

"Ada peraturan desanya tapi belum disahkan tadi. Kepatuhan masyarakatnya juga masih kurang. Sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga tidak ada karena tidak ada peraturan yang mengikat tadi."

Sekretaris Desa menyebutkan meskipun di tingkat daerah sudah ada peraturan daerah tentang sampah namun tidak pernah ada penerapan sanksi. Kasi Kesejahteraan menyatakan hanya ada sanksi di atas baliho saja, untuk sanksi yang nyata tidak ada. Tingkat kepatuhan masyarakat juga masih

kurang terhadap aturan. Sedangkan Kaur Keuangan mengkonfirmasi bahwa tidak ada sanksi yang diterapkan.

Ketua BPD yang memberikan jawaban berbeda, mengatakan bahwa pemerintah desa dan BPD terus menyampaikan himbauan melalui spanduk. Sementara Ketua RT 04 memiliki pandangan yang lebih optimis mengatakan:

"Tidak ada sanksinya karena terkait sampah sekarang masih belum ada peraturan desanya. Kepatuhan masyarakat disini bagus saja. Masyarakat desa biasanya lebih penurut saja apabila diberi tahu. Anggapannya sekali saja di beritahu mereka mengikuti saja."

Pendapat lainnya diungkapkan masyarakat yang menyebutkan:

"Pernah ada spanduk yang memuat foto pelanggar pembuangan sampah liar sebagai bentuk sanksi sosial. Tapi tahun lalu rasanya di depan komplek Lyandra itu karena sepanjang jalannya jadi tempat pembuangan sampah illegal jadi pernah ada spanduk yang berisikan himbauan dan foto orang yang membuang sampah sembarangan di tempat sampah illegal itu. Bisa jadi menurut saya itu adalah salah satu sanksi dari pemerintah desa."

Kenyataannya upaya tersebut tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, spanduk tersebut kini sudah tidak ada lagi. Terry (1972) menegaskan bahwa *Controlling* yang efektif harus bersifat sistematis, terukur dan diikuti dengan tindakan korektif yang nyata. Absennya fungsi pengendalian ini menyebabkan organisasi kehilangan umpan balik yang diperlukan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat kesimpulan dari analisi strategi pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut:

Tabel 2 Kesimpulan Teori POAC Pengelolaan Sampah Di Desa Semangat Dalam

Dimensi POAC	Indikator	Kondisi Dilapangan	Kesimpulan
<i>Planning</i>	Jenis sampah	Sampah rumah tangga	Belum optimal
	Program dan peraturan	Tidak ada program pengelolaan sampah yang terstruktur	Belum ada
	Anggaran	Tidak ada alokasi APBDes; kepala desa pernah pakai dana pribadi	Tidak ada
	Partisipasi Masyarakat	Musdes ada namun tidak spesifik membahas sampah dan tidak terdokumentasi baik	Terbatas
<i>Organizing</i>	Tim khusus	Belum terbentuk; terkendala anggaran honorarium	Belum terbentuk
	Koordinasi	Hanya himbauan informal melalui ketua RT; tanpa jadwal tetap	Sangat terbatas
	Relawan	Ada pengangkut sampah non-formal berbasis iuran sukarela warga	Non-formal
	Kendala	Tidak adanya petugas karena tidak ada	Belum optimal

	pengorganisasian	dana	
<i>Actuating</i>	Program berjalan	Tidak ada program terstruktur; hanya himbauan dan koordinasi RT	Belum optimal
	Fasilitas	2 bak sampah dan gerobak hibah DLH; kurang terawat karena tidak ada petugas	Terbatas
	Inovasi	Tidak ada; rencana bank sampah terhenti karena tidak ada dana	Tidak ada
	Upaya Sosialisasi		
<i>Controlling</i>	Pengawasan	Tidak ada pengawasan terjadwal; reaktif bila ada kasus	Sangat terbatas
	Evaluasi rutin	Tidak pernah dilaksanakan evaluasi periodik pengelolaan sampah	Tidak ada
	Kendala Struktural		
	Sanksi	Tidak ada sanksi mengikat; hanya spanduk himbauan (sudah tidak ada)	Tidak ada

Sumber: Data yang Diolah Pribadi, 2026

B. Pembahasan

Keterkaitan Antardimensi POAC dan Argumentasi Konseptual Kegagalan Fungsi Manajemen

Temuan pada keempat dimensi POAC di atas tidak dapat dipahami sebagai empat persoalan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu rangkaian kegagalan manajerial yang saling mengunci (*interlocking failure*). Lemahnya *Planning*, yang tercermin dari belum disahkannya peraturan desa dan tidak adanya alokasi anggaran, menjadi akar penyebab yang menjalar ke seluruh dimensi berikutnya. Ketiadaan payung hukum menyebabkan pemerintah desa tidak memiliki dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan pembentukan tim pengelola sampah pada dimensi *Organizing*, sebagaimana secara eksplisit diungkapkan Kepala Desa bahwa penerbitan SK mensyaratkan anggaran honorarium yang justru tidak tersedia akibat lemahnya *Planning*. Dengan kata lain, kegagalan *Organizing* di Desa Semangat Dalam bukan persoalan pengorganisasian yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi langsung dari kegagalan perencanaan anggaran dan regulasi.

Keterkaitan yang sama terlihat antara *Organizing* dan *Actuating*. Tanpa struktur dan tim yang jelas, penggerakan program (*Actuating*) tidak memiliki penanggung jawab operasional, sehingga bentuk penggerakan yang muncul hanya berupa himbauan informal dan spanduk yang bersifat sementara. Ketiadaan tim pengelola menjelaskan mengapa fasilitas yang ada, seperti bak sampah dan gerobak hibah, cepat tidak terawat, sebab tidak ada pihak yang secara formal bertanggung jawab atas pemeliharannya. Rencana inovasi seperti bank sampah pun terhenti bukan semata karena ketiadaan dana, melainkan karena tidak ada unit organisasi yang mengelola dan mengawal keberlanjutan program tersebut dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pada gilirannya, lemahnya *Actuating* turut melemahkan *Controlling*. Pengawasan dan evaluasi memerlukan indikator kinerja yang seharusnya ditetapkan pada tahap *Planning* dan dijalankan oleh unit kerja yang dibentuk pada tahap *Organizing*; ketiadaan keduanya menjadikan *Controlling* di Desa Semangat Dalam bersifat reaktif dan insidental, baru dilakukan ketika muncul kasus konkret seperti sengketa lahan tempat pembuangan sampah bukan sebagai mekanisme rutin yang terjadwal. Ketiadaan sanksi yang mengikat merupakan konsekuensi dari belum disahkannya peraturan desa pada tahap *Planning*, sehingga *Controlling* kehilangan basis legal untuk menegakkan kepatuhan. Dengan demikian, keempat dimensi POAC di Desa Semangat Dalam membentuk sebuah siklus kegagalan yang berawal dan berakhir pada lemahnya perencanaan: *Planning* yang tidak tuntas menghambat *Organizing*, *Organizing* yang lemah membatasi *Actuating*, dan *Actuating* yang minim menyebabkan *Controlling* kehilangan basis pijak.

Secara konseptual, pola kegagalan yang saling terkait ini dapat dijelaskan melalui perspektif kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*) dalam manajemen publik. Robbins dan Coulter (2012) menegaskan bahwa kegagalan sistem pengendalian dalam organisasi publik umumnya bersumber dari kombinasi tiga faktor, yaitu keterbatasan sumber daya, ketidakjelasan regulasi dan lemahnya motivasi pelaksana; ketiga faktor tersebut secara konsisten muncul di setiap dimensi POAC pada penelitian ini, bukan hanya pada dimensi *Controlling* semata. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan yang terjadi bersifat sistemik, bukan sekadar kelemahan teknis administratif pada satu fungsi tertentu. Drucker (2008) turut menekankan bahwa manajemen publik yang efektif mensyaratkan kejelasan struktur dan tanggung jawab yang berkelanjutan dari tahap perencanaan hingga pengendalian; ketiadaan salah satu mata rantai ini, sebagaimana terjadi pada dimensi *Planning* di Desa Semangat Dalam, secara otomatis melemahkan efektivitas keseluruhan siklus manajemen. Dengan demikian, kegagalan implementasi fungsi manajemen pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam bukan disebabkan oleh ketiadaan kemauan aparat desa, melainkan oleh ketiadaan fondasi regulasi dan anggaran pada tahap *Planning* yang berdampak berantai pada tahap-tahap manajemen berikutnya, sehingga intervensi kebijakan yang paling mendesak untuk dilakukan adalah pada penguatan *Planning* sebagai titik ungkit (*leverage point*) perbaikan keseluruhan sistem.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala berdasarkan teori POAC (*Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*) menurut George R. Terry belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari dimensi *Planning* belum adanya peraturan desa yang disahkan, tidak tersedianya program dan anggaran

husus pengelolaan sampah. Dimensi *Organizing* belum terbentuknya tim pengelola yang terstruktur, minimnya fasilitas dan inovasi pengelolaan. Dimensi *Actuating* belum adanya program yang dijalankan, fasilitas belum memadai, inovasi belum ada dan upaya sosialisasi dan edukasi hanya berupa spanduk. Dimensi *Controlling* pengawasan dan evaluasi masih lemah dan belum ada sanksi tegas bagi yang melanggar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih bersifat reaktif dan belum menjadi prioritas pembangunan desa.

Menjawab rumusan masalah kedua, kegagalan implementasi keempat fungsi manajemen tersebut bersumber dari satu akar masalah yang sama, yaitu lemahnya *Planning* berupa belum disahkannya peraturan desa dan tidak tersedianya anggaran, yang kemudian menjalar secara berantai dan melemahkan *Organizing*, *Actuating*, hingga *Controlling*, sebagaimana diuraikan pada bagian keterkaitan antardimensi POAC. Secara teoretis, temuan ini memperkuat sekaligus memperluas aplikasi teori POAC George R. Terry ke ranah tata kelola lingkungan pemerintahan desa perbatasan antara perdesaan dan perkotaan, sejalan dengan temuan terbaru Nuranindita dan Choiriyah (2026) bahwa efektivitas pelayanan publik berbasis sampah di tingkat desa sangat bergantung pada keseimbangan antarfungsi manajemen, bukan pada satu fungsi tertentu semata. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokus yang hanya mencakup satu desa dan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokus penelitian serta mengkaji dampak digitalisasi tata kelola sampah di tingkat desa.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa disarankan untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai agenda prioritas melalui penyusunan regulasi desa, pengalokasian anggaran dalam APBDes, pembentukan kelembagaan pengelola sampah serta memperkuat koordinasi dengan BPD, ketua RT, Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi berkelanjutan serta pengembangan inovasi seperti bank sampah dan sistem pengelolaan berbasis komunitas agar tercipta tata kelola persampahan yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulwalidain, A. (2022). Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 6(1), 95-103.
- Anggraini, H., Masyudi, L., & Mulyawan, U. (2024). Strategi Pengelola TPS 3R Bonjeruk Asri Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Desa Wisata Bonjeruk Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Responsible Tourism*, 4(1), 227-234.
- Arifin, M. Z. A., Wijaya, I. N. S. W. S., & Firdausiyah, N. F. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KENEP

KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO. Tata Kota dan Daerah, 16(2), 207-216.

- Artiningsih, N. K. A., Setyono, J. S., & Syafrudin. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Komunitas Perumahan peri-urban dalam Reduksi Sampah Organik Domestik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 114–122.
- Azwar, B. (2016). Konseptualisasi Urusan Sanitasi Lingkungan dan Pembuangan Limbah Rumah Tangga Mandiri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 85-92.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2016). *Dinamika Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Penyangga: Edisi Revisi*. Institut Teknologi Bandung.
- Hartono, B. (2018). *Sistem Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik di Sektor Domestik*. Penebar Swadaya Grup.
- Juwandi, R., & Taufan, M. A. (2023). Kebijakan Pemerintah Kota Serang dalam Pengelolaan Sampah sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2365-2379.
- Kusnadi, A. (2017). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(1), 22-31.
- Lupiyanto, R., Nurhasanah, & Hamzah, P. H. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Lingkungan TPS3R Perkotaan (Studi Kasus: TPS3R Kenanga, Kabupaten Sleman, DIY). *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 8(4), 927-939.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Mufidah, S., Mustainah, & Nawawi, M. (2024). Manajemen Pemungutan Retribusi Sampah di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(5), 1110-1121.
- Nuranindita, D., & Choiriyah, I. U. (2026). Analysis of Management Functions in Village Waste Management: A Case Study of Ngaban Village, Sidoarjo Regency. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 11(2), 261-291.
- Nurcholis, H. (2018). *Teori dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Konseptual*. Erlangga.
- Permatasari, N. P. N., Anis, A., & Anis, M. S. A. (2025). MANAJEMEN MEDIA ONLINE DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BREBES DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: ANALISIS BERDASARKAN TEORI POAC GEORGE R. TERRY. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(9), 71-80.
- Rahmayanti, A., Hamidah, L. N., & Zakariyah, M. A. (2022). Studi Pengelolaan Bank Sampah Desa Randegan Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo. *Environmental Engineering Journal ITATS*, 2(1).

-
- Riswan, R., Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2019). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Peri-Urban Terhadap Volume Timbulan Sampah Domestik Lokal. *Jurnal Tata Lingkungan Wilayah*, 11(2), 45-53.
- Sasaki, S., & Araki, T. (2014). Estimating the possible range of recycling rates achieved by waste pickers: The case of Bantar Gebang in Indonesia. *Waste Management & Research*, 32(6), 474–481. (Catatan: Dipertahankan karena kesesuaian data empiris sosiologis)
- Siagian, S. P. (2018). *Fungsi-Fungsi Manajerial Kebijakan Publik di Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Suryani, A. S. (2018). Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tingkat Sektor Publik Daerah Peri-Urban. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 71–84.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51-61.
- Wati, F. R., Rizqi, A., Iqbal, M. M., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10(1), 195-203.
- Wijayanti, N., & Wicaksana, F. A. (2023). Implementasi Fungsi Manajemen George R Terry Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 30-43.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.